

**ANALYSIS OF THE INFLUENCE OF HUMAN RESOURCES, PARTICIPATION IN BUDGETING, AND BUDGETING OF THE VILLAGE FINANCIAL MANAGEMENT SYSTEM THROUGH BMPD SOUTH CENTRAL TIMOR**

**ANALISIS PENGARUH SUMBER DAYA MANUSIA, PARTISIPASI PENYUSUNAN ANGGARAN, DAN PENYUSUNAN ANGGARAN TERHADAP SISTEM MANAJEMEN AKUNTANSI PENGELOLAAN KEUANGAN DESA MELALUI BMPD TIMOR TENGAH SELATAN**

<sup>1</sup>Dedy Raidons Se'u

[dedyseu@gmail.com](mailto:dedyseu@gmail.com)

<sup>2</sup>Jofret Umbu Soru Peku

Djawang

[jofretdiawang89@gmail.com](mailto:jofretdiawang89@gmail.com)

<sup>1,2</sup>Prodi. Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Kristen Artha Wacana

**Abstract**

Research is focused to analyze the influence of human resources, participation in the preparation of the budget, and the preparation of the budget Toward Financial Management Accounting Management system of village in South Central Timor Regency, East Nusa Tenggara province. This research was conducted because the village Government apparatus in the financial management of the village has not been in accordance with the applicable provisions. This research is expected to be beneficial to the Government of the village of South Central Timor Regency province of East Nusa Tenggara (NTT) in an attempt to improve the financial management of the village is effectively and efficiently in order to improve the performance of the apparatus of Government village in South Central Timor Regency. Research conducted in six villages that existed in South Central Timor Regency implementing financial management as the location of the village. Data sources are some of the apparatus of Government, composed of the head of the village, the village Secretary, Financial Development, Kasie Kaur, and Kasie Kesra. Research done by disseminating a questionnaire in the form of a statement for the content and manner of doing observations about the financial management of the village. The results showed that for the planning and execution of the financial management of the village, already revealed the existence of a Village financial management accountable and transparent, but the Administration is still required the existence of a coaching more, because not yet fully comply with the provisions. The main obstacle is not yet effectively coaching apparatus of Government and the competence of human resources are adequate, so still need coaching and mentoring from BPMPD as local government authorities on an ongoing basis.

**Keywords:** Human Resources, Budgeting, Financial, Accounting Management System.

**Abstrak**

Penelitian difokuskan untuk menganalisis Pengaruh Sumber Daya Manusia, Partisipasi Penyusunan Anggaran, dan Penyusunan Anggaran Terhadap Sistem Manajemen Akuntansi Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Timor Tengah Selatan Provinsi Nusa Tenggara Timur. Penelitian ini dilakukan karena aparatur Pemerintahan Desa dalam Pengelolaan Keuangan Desa belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi Pemerintahan Desa Kabupaten Timor Tengah Selatan Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) dalam upaya meningkatkan Pengelolaan Keuangan Desa secara efektif serta efisien dalam rangka meningkatkan kinerja aparatur Pemerintahan Desa di Kabupaten Timor Tengah Selatan. Penelitian dilakukan pada enam desa yang ada di Kabupaten Timor Tengah Selatan sebagai lokasi pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa. Sumber data merupakan beberapa aparatur pemerintahan, yang terdiri dari Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kaur Keuangan, Kasie Pembangunan, dan Kasie Kesra. Penelitian dilakukan dengan menyebarkan kuesioner berupa pernyataan untuk di isi dan dengan cara melakukan observasi tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa untuk perencanaan dan pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa, sudah menampakkan adanya Pengelolaan Keuangan Desa yang akuntabel dan transparan, namun dari sisi administrasi masih diperlukan adanya pembinaan lebih lanjut, karena belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan. Kendala utama adalah belum efektifnya pembinaan aparatur pemerintahan desa dan kompetensi Sumber Daya Manusia yang memadai, sehingga masih memerlukan pembinaan serta pendampingan dari BPMPD selaku aparat Pemerintah Daerah secara berkelanjutan.

**Kata Kunci: Sumber Daya Manusia, Anggaran, Keuangan, Sistem Manajemen Akuntansi.**

## **PENDAHULUAN**

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 beserta peraturannya telah mengamanatkan pemerintah desa untuk lebih mandiri dalam mengelola pemerintahan dan berbagai sumber daya alam yang dimiliki, termasuk didalamnya pengelolaan keuangan dan kekayaan milik desa. Dalam APBN 2015 telah dialokasikan dana desa sebesar ± Rp 20,776 triliun kepada seluruh desa yang tersebar di Indonesia. Jumlah desa yang ada saat ini sesuai Permendagri Nomor 39 Tahun 2015 sebanyak 74.093 desa. Selain Dana Desa, sesuai Undang-undang Desa Pasal 72, Desa memiliki Pendapatan Asli Desa (PAD) dan pendapatan transfer berupa Alokasi Dana Desa (ADD), bagian dari hasil pajak dan retribusi Kabupaten/Kota, dan Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi/Kabupaten/Kota.

Dalam hal keuangan desa, pemerintah desa wajib menyusun Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa dan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa. Laporan ini dihasilkan dari suatu siklus pengelolaan keuangan desa, yang di mulai dari tahapan perencanaan dan penganggaran; pelaksanaan dan penatausahaan; hingga pelaporan dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa.

Dalam tahap perencanaan dan penganggaran, pemerintah desa harus melibatkan masyarakat desa yang direpresentasikan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang dalam hal ini Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD), sehingga program kerja dan kegiatan yang disusun dapat mengakomodir kepentingan dan kebutuhan masyarakat desa serta sesuai dengan kemampuan yang dimiliki oleh desa tersebut. Selain itu pemerintah desa harus bisa menyelenggarakan pencatatan atau minimal melakukan pembukuan atas transaksi keuangannya sebagai wujud pertanggungjawaban keuangan yang dilakukannya.

Peran dan tanggung jawab yang diterima oleh desa belum diimbangi dengan Sumber Daya Manusia (SDM) yang memadai baik dari segi kuantitas maupun kualitas. Kendala umum lainnya yaitu desa belum memiliki prosedur serta dukungan sarana dan prasarana dalam penyusunan anggaran serta belum adanya partisipasi yang besar dalam pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa. Besarnya dana yang harus dikelola oleh pemerintah desa memiliki risiko yang cukup tinggi dalam pengelolaannya, khusus bagi aparatur pemerintah desa. Fenomena pejabat daerah yang tersangkut kasus hukum jangan sampai terulang kembali dalam skala pemerintahan desa. Aparatur pemerintah desa dan masyarakat desa yang direpresentasikan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) harus memiliki pemahaman atas peraturan perundang-undangan dan ketentuan lainnya, serta memiliki kemampuan untuk melaksanakan pencatatan, pelaporan dan pertanggungjawaban.

Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Kabupaten Timor Tengah Selatan selaku pelaksana tugas desentralisasi Bupati, khususnya dalam bidang pengelolaan pendapatan dan kekayaan desa harus dapat menjalankan Sistem Manajemen Akuntansi Pengelolaan Keuangan Desa secara komprehensif dan terintegrasi dalam strategi pembangunan termasuk pada tahap perencanaan dan pelaksanaannya. Sistem pengelolaan keuangan desa merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa.

Sistem Manajemen Akuntansi Pengelolaan Keuangan Desa adalah sistem terpadu yang menggabungkan prosedur manual dengan proses elektronik dalam pengambilan data pembukuan dan pelaporan semua transaksi keuangan, *asset*, utang, dan *ekuitas* seluruh *entitas* pemerintah desa dalam rangka melaksanakan proses manajemen yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian.

Organisasi pemerintah bukan semata-mata organisasi sosial yang *non-profit oriented*.

Banyak yang menganggap organisasi pemerintah pasti *non-profit*. Anggapan ini kurang tepat, karena organisasi pemerintah ada yang bertipe *quasi non-profit* yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan motif *surplus* (laba) agar terjadi keberlangsungan organisasi dan memberikan kontribusi terhadap pendapatan negara atau daerah, misalnya BUMN dan BUMD. Oleh karena itu, pengelolaan administrasi pemerintahan di desa perlu memahami akuntansi. Mereka juga harus memahami pelaporan akuntansi dan juga memahami bagaimana informasi akuntansi digunakan untuk perencanaan, pembuatan keputusan, dan pengendalian. Menurut Carmen (2012) “*Accounting is a communication and dialogue between the internal and external-actorsll, which imposes a permanent education and training*”. Yang mana akuntansi merupakan alat komunikasi yang mendukung komunikasi dan dialog antara internal dan eksternal aktor yang menetapkan pendidikan permanen dan pelatihan.

Hal ini terbukti bahwa akuntansi menjadi lebih diperlukan saat ini, untuk menjalin komunikasi antara pihak eksternal dan internal dari sebuah organisasi. Dengan adanya sistem akuntansi maka informasi dari sebuah organisasi tersedia dan dapat digunakan untuk pengambilan keputusan baik pihak eksternal maupun internal. Menurut Widyaningsih (2011), bahwa tujuan umum pengembangan sistem akuntansi diantaranya adalah untuk menyediakan informasi bagi pengelolaan kegiatan usaha baru dan untuk memperbaiki informasi yang dihasilkan oleh sistem yang sudah ada, baik mengenai mutu, ketepatan penyajian, maupun struktur informasinya. Ini menandakan bahwa untuk memediasi hubungan antara pemerintah desa dengan *stakeholder* diperlukan suatu mediasi untuk mengkomunikasikan program pemerintah. Salah satu media yang dipandang relevan dalam mengkomunikasikan dan dijadikan sebagai alat untuk mengawasi program-program pemerintah yang tercermin dalam APBD adalah sistem akuntansi daerah.

Sumber Daya Manusia (SDM) sebagai pengelola keuangan pemerintah desa wajib meningkatkan kualitas. Sesuai dengan UU Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, bahwa pengelolaan keuangan desa hingga mencapai Rp 1 Miliar harus dikelola dengan *profesional*, agar tidak terjadi kesalahan dan penyimpangan yang dilakukan aparatur pemerintah desa. Pengetahuan tentang Sistem Manajemen Akuntansi Pengelolaan Keuangan Desa wajib dimiliki aparatur pemerintah desa di daerah, sehingga penyelenggaraan pemerintahan desa terlaksana dengan baik dan tertib administrasi. Dengan adanya aturan tersebut, maka Pemprov terus berupaya memberikan pembinaan terhadap aparatur pemerintah desa, yaitu dengan melakukan bimbingan teknik sistem pengelolaan keuangan daerah bagi aparatur pemerintah desa. Dengan demikian, pengelolaan keuangan desa serta Sistem Manajemen Akuntansi Pengelolaan Keuangan Desa dapat dijalankan sesuai dengan sistem dan prosedur pengelolaan keuangan desa dengan baik serta tertib administrasi.

Melalui UU Nomor 6 tahun 2014, diharapkan aparatur pemerintah desa akan bekerja lebih *professional* dalam mengelola administrasi keuangan desa, sehingga penyelenggaraan pemerintahan desa bisa berjalan dengan baik dan berkesinambungan. Termasuk mengenai pelaksanaan proyek pembangunan di desa, diharapkan pengelolaannya dapat dilaksanakan sesuai aturan yang ditetapkan pemerintah. Pemerintah desa juga diharapkan harus lebih memahami Sistem Manajemen Akuntansi Pengelolaan Keuangan Desa yang benar. Diharapkan dengan adanya bantuan keuangan desa dari Pemprov dapat dimanfaatkan pemerintah desa untuk meningkatkan kualitas SDM aparatur desa, sehingga Sistem Manajemen Akuntansi Pengelolaan Keuangan Desa tertib aturan dan sesuai dengan prosedur Pengelolaan Keuangan Desa.

Dengan dikeluarkannya Undang-Undang No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, maka terjadi perubahan mendasar dalam sistem

Pemerintahan Indonesia yang semula sangat sentralistik menjadi desentralistik. Sebagai Daerah Otonomi, daerah mempunyai kewenangan yang luas dan tanggungjawab yang besar untuk melaksanakan kepentingan masyarakat berdasarkan prinsip-prinsip keterbukaan, partisipasi aparatur desa, dan pertanggungjawaban kepada masyarakat.

Pengelolaan pemerintahan yang bersih dan baik merupakan salah satu hal yang paling penting dalam kehidupan masyarakat. Dalam suatu pengelolaan pemerintahan yang baik dan bersih dapat diartikan bahwa seluruh kegiatan yang dilakukan pemerintah harus bebas dari unsur penyalahgunaan kekuasaan dan penyalahgunaan dana atau anggaran yang dikumpulkan dari rakyat dalam kaitannya untuk mencapai tujuan dengan tetap memperhatikan prinsip efisiensi, kejujuran dan kehati-hatian (Arsyati, dkk: 2008). Dengan adanya pemberian pelayanan yang baik, dan adanya tata kelola keuangan pemerintah yang baik serta adanya niat dari pemerintah untuk bersedia mempertanggungjawabkan dana atau anggaran yang terkumpul adalah salah satu bentuk pertanggungjawaban atau akuntabilitas pemerintah yang digunakan sebagai dasar dari penerapan sistem tata kelola pemerintahan dalam rangka mewujudkan *good governance*.

Pada hakekatnya melalui penyelenggaraan otonomi daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah. Hal ini merupakan konsekuensi dari pelaksanaan otonomi daerah, dimana pemerintah daerah dituntut untuk meningkatkan kinerjanya dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, terutama yang ada di desa.

Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Kabupaten Timor Tengah Selatan sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku merupakan unsur pelaksana pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan dibidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa.

Pentingnya mendukung kesejahteraan ekonomi masyarakat desa menuntut BPMPD Kabupaten Timor Tengah Selatan untuk terus meningkatkan Sistem Manajemen Akuntansi Pengelolaan Keuangan Desa yang akuntabilitas serta transparan agar keinginan dan harapan pemerintah di desa dapat tercapai guna kelangsungan hidup masyarakat desa Kabupaten Timor Tengah Selatan ke arah yang lebih baik sesuai keinginan pemerintahan yang ada di Kabupaten Timor Tengah Selatan.

#### **Sistem Manajemen Akuntansi**

Sistem Manajemen Akuntansi menghasilkan informasi untuk pengguna internal, seperti manajer, *eksekutif*, dan pekerja. Secara spesifik, Manajemen Akuntansi mengidentifikasi, mengumpulkan, mengukur, mengklasifikasi, dan melaporkan informasi yang bermanfaat bagi pengguna internal dalam merencanakan, mengendalikan, dan membuat keputusan. Dalam menghasilkan suatu informasi, Sistem Manajemen Akuntansi meliputi serangkaian proses manajemen (Hansen, 2009: 7), antara lain :

- **Perencanaan** adalah formulasi terinci dari kegiatan untuk mencapai suatu tujuan akhir tertentu. Oleh sebab itu, perencanaan mensyaratkan penetapan tujuan dan pengidentifikasian metode untuk mencapai tujuan tersebut.
- **Pengendalian** adalah kegiatan memonitor pelaksanaan rencana dan tindakan korektif sesuai kebutuhan untuk memastikan rencana tersebut berjalan sebagaimana semestinya.
- **Pengambilan keputusan** adalah proses pemilihan diantara berbagai alternatif. Peran utama dari Sistem Informasi Manajemen Akuntansi adalah menyediakan informasi yang memudahkan manajer dalam proses pengambilan keputusan.

#### **Penyusunan Anggaran**

Proses penyusunan anggaran merupakan kegiatan yang penting dan melibatkan berbagai pihak, baik manajer tingkat atas maupun manajer tingkat bawah yang akan memainkan peranan dalam mempersiapkan dan mengevaluasi berbagai alternatif dari sasaran anggaran (Keni: 2008). Peran manajer baik manajer bawah, manajer menengah dan atas dalam penyusunan anggaran akan memberikan manfaat antara lain mengurangi ketimpangan informasi dalam perusahaan dan menimbulkan komitmen yang lebih besar kepada para manajer dalam melaksanakan dan memenuhi anggaran (Keni: 2008). Oleh karenanya, penyusunan anggaran partisipatif diharapkan akan meningkatkan kinerja para manajer, di mana ketika suatu tujuan dirancang dan secara partisipasi disetujui, maka karyawan akan menginternalisasi tujuan yang ditetapkan, dan memiliki rasa tanggung jawab pribadi untuk mencapainya karena mereka ikut terlibat dalam penyusunan anggaran tersebut.

### **Partisipasi Penyusunan Anggaran**

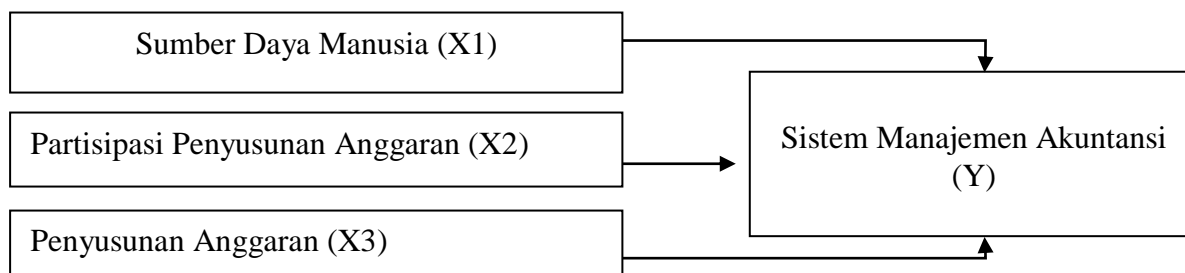
Menurut Halim (2007) bahwa Partisipasi Penyusunan Anggaran merupakan partisipasi aparat pemerintah daerah dalam proses penganggaran pemerintah daerah mengarah pada seberapa besar tingkat keterlibatan aparat pemerintah daerah dalam menyusun anggaran serta pelaksanaannya untuk mencapai target anggaran. Penyusunan Anggaran merupakan suatu proses yang berbeda antara sektor swasta dengan sektor pemerintah, termasuk diantaranya pemerintah daerah. Pada sektor swasta, anggaran merupakan bagian dari rahasia perusahaan yang tertutup untuk publik, namun sebaliknya pada sektor pemerintahan justru harus diinformasikan kepada publik untuk dikritik dan didiskusikan dengan tujuan untuk mendapatkan masukan. Anggaran sektor publik merupakan rencana terinci tentang pemerolehan dan sumber daya keuangan serta sumber daya lainnya selama suatu periode waktu tertentu, anggaran sektor publik menunjukkan rencana masa depan yang dinyatakan dalam kuantitatif yang formal (Widjaya, 2009:1).

### **Sumber Daya Manusia**

Menurut Sofyandi (2009: 6), manajemen Sumber Daya Manusia didefinisikan sebagai suatu strategi dalam menerapkan fungsi-fungsi manajemen yaitu *planning, organizing, leading and controlling*. Dalam setiap aktivitas atau fungsi operasional Sumber Daya Manusia mulai dari proses penarikan, seleksi, pelatihan dan pengembangan, penempatan yang meliputi promosi, demosi, dan transfer, penilaian kinerja, pemberian kompensasi, hubungan industrial, hingga pemutusan hubungan kerja, yang ditujukan bagi peningkatan kontribusi produktif dari Sumber Daya Manusia organisasi terhadap pencapaian tujuan organisasi secara lebih efektif dan efisien.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat di susun kerangka konseptual yang menggambarkan pengaruh antara variabel independen dan variabel dependen sebagai berikut: a) adanya pengaruh variabel sumber daya manusia terhadap sistem manajemen akuntansi. Dengan adanya proses penarikan, seleksi, pelatihan dan pengembangan serta penempatan yang meliputi promosi, demosi, dan transfer dapat mempengaruhi sistem manajemen akuntansi pengelolaan keuangan desa; b) adanya pengaruh variabel partisipasi penyusunan anggaran terhadap variabel sistem manajemen akuntansi. Dengan adanya keterlibatan aparat pemerintah daerah dalam menyusun anggaran serta pelaksanaannya untuk mencapai target anggaran dapat mempengaruhi sistem manajemen akuntansi pengelolaan desa; c) adanya pengaruh penyusunan anggaran terhadap sistem manajemen akuntansi pengelolaan keuangan desa. Dengan adanya penyusunan anggaran partisipatif diharapkan akan meningkatkan kinerja para perangkat desa, di mana ketika suatu tujuan dirancang dan secara partisipasi disetujui, maka karyawan akan menginternalisasi tujuan yang ditetapkan, dan memiliki rasa tanggung jawab pribadi untuk mencapainya karena mereka ikut terlibat dalam penyusunan anggaran tersebut.

### **Gambar 1. Kerangka Konseptual**



Variabel-variabel tersebut akan dianalisis dalam penelitian sehingga diketahui seberapa besar pengaruh masing-masing variabel independen (Sumber Daya Manusia, Partisipasi Penyusunan Anggaran, dan Penyusunan Anggaran) tersebut dapat mempengaruhi variabel dependen (Sistem Manajemen Akuntansi), maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

- H<sub>1</sub> : Sumber Daya Manusia berpengaruh terhadap Sistem Manajemen Akuntansi
- H<sub>2</sub> : Partisipasi Penyusunan Anggaran berpengaruh terhadap Sistem Manajemen Akuntansi.
- H<sub>3</sub> : Penyusunan Anggaran berpengaruh terhadap Sistem Manajemen Akuntansi.
- H<sub>4</sub> : Sumber Daya Manusia, Partisipasi Penyusunan Anggaran, dan Penyusunan Anggaran secara simultan berpengaruh terhadap Sistem Manajemen Akuntansi.

**METODE**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode penelitian *survey*, yaitu penelitian yang mengambil sampel dari suatu populasi serta menggunakan *kuesioner* sebagai alat pengumpul data yang utama. Penelitian ini berusaha menjelaskan hubungan antara variabel-variabel penelitian dan menguji hipotesis yang telah dirumuskan sebelumnya. Walaupun penjelasannya mengandung deskripsi, namun sebagai penelitian relasional fokusnya terletak pada penjelasan hubungan antar variabel (Singarimbun: 2006). Dalam penelitian ini, yang menjadi objek penelitian adalah Pemerintahan Desa Kabupaten Timor Tengah Selatan.

**PEMBAHASAN**

**1. Analisis Deskriptif**

Analisis yang dilakukan terhadap 16 jawaban responden yang memenuhi kriteria untuk dilakukan pengolahan data lebih lanjut. Data yang diolah merupakan hasil rata-rata jawaban responden dari setiap faktor individu yang terdiri dari Sumber Daya Manusia, Partisipasi Penyusunan Anggaran, Penyusunan Anggaran, dan Sistem Manajemen Akuntansi Pengelolaan Keuangan desa Kabupaten Timor Tengah Selatan yang menjadi variabel dalam penelitian ini. Statistik deskriptif variabel penelitian dapat dilihat pada tabel 1 dibawah ini:

**Tabel 1**  
**Descriptive Statistics**

	Mean	Std. Deviation	N
<b>Sistem Manajemen Akuntansi</b>	4.00	.656	80
<b>SDM</b>	3.79	.964	80
<b>Partisipasi Penyusunan Anggaran</b>	3.84	1.061	80
<b>Penyusunan Anggaran</b>	4.11	.746	80

Sumber: Data Olahan manual SPSS, 2017

Berdasarkan tabel 1 di atas, dapat dilihat bahwa Sistem Manajemen Akuntansi Pengelolaan Keuangan Desa mempunyai nilai rata-rata sebesar 4,00 dengan standar deviasi 0,656, Sumber Daya Manusia mempunyai nilai rata-rata sebesar 3,79 dengan standar deviasi 0,964, Partisipasi Penyusunan Anggaran mempunyai nilai rata-rata 3,84 dengan standar deviasi 1,061, dan Penyusunan Anggaran mempunyai nilai rata-rata sebesar 4,11 dengan standar deviasi 0,746. Artinya dari Variabel Sistem Manajemen Akuntansi Pengelolaan Keuangan Desa, Sumber Daya Manusia, Partisipasi Penyusunan Anggaran, dan Penyusunan Anggaran tidak ada yang berpengaruh signifikan yaitu signifikansi > 0,05.

## 2. Analisis Regresi Linier Berganda

Hasil analisis dari pengaruh Sumber Daya Manusia (X1), Partisipasi Penyusunan Anggaran (X2), dan Penyusunan Anggaran (X3) terhadap Sistem Manajemen Akuntansi Pengelolaan Keuangan Desa (Y) Kabupaten Timor Tengah Selatan sebagai berikut:

**Tabel 2**  
**Hasil Analisis Regresi**

Model	Unstandardized Coefficients (B)	t	Sig.	Ket.
<b>Constant</b>	4.238			
<b>Sumber Daya Manusia (X1)</b>	-0.069	-0.856	0.395	Tdk Sig
<b>Partisipasi Penyusunan Anggaran (X2)</b>	0.078	1.077	0.285	Tdk Sig
<b>Penyusunan Anggaran (X3)</b>	-0.068	-0.668	0.506	Tdk Sig
<b>R</b>		0.160		
<b>R Square</b>		0.026		
<b>F hitung</b>		0.666		
<b>F<sub>tabel</sub></b>		2.729		
<b>Sig.F</b>		0,576		
<b>A</b>		0,05		

Sumber: Output manual SPSS

Model regresi berdasarkan hasil analisis di atas adalah

$$Y = 4.238 + -0.069X_1 + 0.078X_2 + -0.068X_3 + \epsilon$$

Persamaan tersebut menunjukkan bahwa tidak ada angka yang signifikan pada Variabel Sistem Manajemen Akuntansi Pengelolaan Keuangan Desa yang diwakili oleh Sumber Daya Manusia (X1), Partisipasi Penyusunan Anggaran (X2), dan Penyusunan Anggaran (X3). Artinya diantara variabel Sumber Daya Manusia, Partisipasi Penyusunan Anggaran, dan Penyusunan Anggaran tidak ada yang berpengaruh paling dominan antara variabel bebas yang satu dengan variabel bebas yang lainnya.

## 3. Uji Asumsi Klasik

### a. Uji Auto Korelasi

**Tabel 3**  
**Uji Auto Korelasi**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.160 <sup>a</sup>	.026	-.013	.660	1.866

- a. Predictors: (Constant), Penyusunan Anggaran, Partisipasi Penyusunan Anggaran, SDM.
- b. Dependent Variable: Sistem Manajemen Akuntansi Pengelolaan Keuangan Desa.

Sumber : data diolah manual, 2017

Berdasarkan output tabel SPSS diketahui nilai Durbin-Watson sebesar 1.866. nilai ini akan dibandingkan dengan nilai tabel signifikansi 5%, yaitu jumlah sampel sebanyak 80 (N) dan jumlah variabel independent 3 ( $K=3$ ) = 3.80, sehingga diperoleh nilai  $du$  sebesar 1.715. Nilai Durbin-Watson sebesar 1.866 lebih besar dari batas atas ( $du$ ) yakni 1.715 dan kurang dari ( $4-du$ )  $4-1.715=2.285$  sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat autokorelasi. Artinya antara Sumber Daya Manusia, Partisipasi Penyusunan Anggaran, dan Penyusunan Anggaran tidak terdapat autokorelasi yang sempurna.

**b. Uji Multikolinearitas**

**Tabel 4**  
**Hasil Uji Multikolinearitas**

Model	Perhitungan		Keterangan
	Tolerance	VIF	
Sumber Daya Manusia	0.915	1.093	Tdk. trjadi. Multikolinearitas
Partisipasi Penyusunan Anggaran	0.925	1.082	Tdk. trjadi. Multikolinearitas
Penyusunan Anggaran	0.969	1.032	Tdk. trjadi. Multikolinearitas

Sumber: Data diolah manual, 2017

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan semua variabel bebas mempunyai nilai  $Tolerance \geq 0,10$  dan nilai  $VIF \leq 10$ . Dengan demikian, dapat di simpulkan bahwa seluruh variabel bebas dalam penelitian ini tidak terjadi Multikolinearitas.

**c. Uji Heterokedastisitas**

**Tabel 5**  
**Hasil Uji Heterokedastisitas**

Variabel	Sig.	Keterangan
Sumber Daya Manusia	0.395	Tidak terjadi Heterokedastisitas
Partisipasi Penyusunan Anggaran	0.285	Tidak terjadi Heterokedastisitas
Penyusunan Anggaran	0.506	Tidak terjadi Heterokedastisitas

Sumber: data diolah manual, 2017

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa seluruh variabel bebas mempunyai nilai probabilitas signifikansi lebih besar dari 0,05. Dengan demikian, hal ini dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi Heterokedastisitas dalam model regresi.

**4. Uji Hipotesis**

**a. Uji Hipotesis Pertama**

**Tabel 6**  
**Pengujian Hipotesis Pertama**

Hipotesis Alternatif ( $H_a$ )	Nilai	Keterangan
Terdapat pengaruh yang signifikan dari Sumber Daya Manusia, Partisipasi Penyusunan Anggaran, dan Penyusunan Anggaran terhadap Sistem Manajemen Akuntansi pengelolaan keuangan desa	F hitung = 0.666 Sig. F = 0.576 $F_{tabel} = 2.729$	$H_a$ diterima

Sumber : data diolah manual, 2017

Tabel di atas menunjukkan bahwa Variabel Sumber Daya Manusia, Partisipasi Penyusunan Anggaran, dan Penyusunan Anggaran tidak berpengaruh signifikan terhadap Sistem Manajemen Akuntansi Pengelolaan Keuangan desa. Pada pengujian ini  $H_0$  ditolak yang ditunjuk dengan besarnya  $F_{tabel}$  sebesar 2.729. Nilai ini lebih besar dari  $F_{hitung}$  ( $0.666 < 2.729$ ). Hal ini menunjukkan bahwa tidak terdapat pengaruh yang cukup signifikan dari variabel Sumber Daya Manusia, Partisipasi Penyusunan Anggaran, dan Penyusunan Anggaran terhadap Sistem Manajemen Akuntansi Pengelolaan Keuangan Desa Kabupaten



Timor Tengah Selatan.

Hasil pengujian hipotesis ini menunjukkan bahwa model regresi yang digunakan untuk menguji 2 variabel, yaitu: variabel independent yang terdiri dari Sumber Daya Manusia, Partisipasi Penyusunan Anggaran, dan Penyusunan Anggaran terhadap variabel dependent yaitu Sistem Manajemen Akuntansi pengelolaan keuangan desa Kabupaten Timor Tengah Selatan merupakan model yang tidak tepat (*fit*). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Sistem Manajemen Akuntansi pengelolaan Keuangan desa Kabupaten Timor Tengah Selatan yang dipengaruhi oleh Sumber Daya Manusia, Partisipasi Penyusunan Anggaran, dan Penyusunan Anggaran tidak berpengaruh secara bersamaan terhadap Sistem Manajemen Akuntansi pengelolaan keuangan desa Kabupaten Timor Tengah Selatan. Hal ini tidak terbukti bahwa Sumber Daya Manusia, Partisipasi Penyusunan Anggaran, dan Penyusunan Anggaran tidak menghasilkan pengaruh yang cukup kuat terhadap Sistem Manajemen Akuntansi Pengelolaan Keuangan Desa, karena semakin tidak baik Sumber Daya Manusia, Partisipasi Penyusunan Anggaran, dan Penyusunan Anggaran dari Pemerintahan Desa Kabupaten Timor Tengah Selatan, maka semakin tidak baik Sistem Manajemen Akuntansi Pengelolaan Keuangan Desa yang ada di Kabupaten Timor Tengah Selatan.

Berdasarkan hasil wawancara dan ditindaklanjuti dengan telaah kualitatif maka ditemukan bahwa setelah alokasi dana diterima oleh masing-masing desa, setiap tahun anggaran Kepala Desa harus menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Realisasi Pelaksanaan APBDesa kepada Bupati melalui BPMPD Kabupaten Timor Tengah Selatan. Hal ini masih terkendala faktor Sumber Daya Manusia yang dimiliki oleh aparatur pemerintahan desa di Kabupaten Timor Tengah Selatan. Sebagian besar aparatur desa yang dimiliki di Kabupaten Timor Tengah Selatan hanya menempuh jenjang sampai SMA/SMU, bahkan aparatur pemerintahan desanya tidak ada yang duduk sampai dibangku perkuliahan (sarjana) kecuali beberapa Kepala desa. Hal tersebut yang mengakibatkan pengelolaan keuangan desa tidak tepat (*fit*). Untuk faktor Partisipasi Penyusunan Anggaran dan Penyusunan Anggaran tidak menemui kendala oleh karena masyarakat desa di Kabupaten Timor Tengah Selatan masih menganut sistem gotong-royong bahkan sampai pada pemerintahan desa sekalipun. Sistem pengelolaan dana desa yang dijalankan pemerintahan desa Kabupaten Timor Tengah Selatan selalu dikerjakan bersama-sama. Hal ini yang membuat Partisipasi dalam Penyusunan Anggaran dalam pengelolaan keuangan desa besar. Hal ini juga berlaku pada Penyusunan Anggaran, yang sistemnya sesuai dengan sistem yang ada di Pemerintahan daerah, sehingga aparatur pemerintahan di desa tidak mengalami kesulitan dalam menyusun Sistem Manajemen Akuntansi Pengelolaan Keuangan Desa. Sistem Penyusunan Anggaran tersebut juga telah di atur dalam Peraturan Bupati Timor Tengah Selatan Nomor 27 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa. Sehingga melalui tahapan ini menunjukkan bahwa pengaruh Sumber Daya Manusia, Partisipasi Penyusunan Anggaran, dan Penyusunan Anggaran terhadap Sistem Manajemen Akuntansi Pengelolaan Keuangan Desa tidak tepat (*fit*).

**b. Uji Hipotesis Kedua Secara Parsial (uji t) Dan Telaah Kualitatif**

**Tabel 7**  
**Pengujian Hipotesis Kedua**

Hipotesis Alternatif ( $H_a$ )	t	Keterangan
Sumber Daya Manusia berpengaruh signifikan secara parsial terhadap Sistem Manajemen Akuntansi pengelolaan keuangan desa	-0.856	$H_a$ ditolak
Partisipasi Penyusunan Anggaran berpengaruh signifikan secara parsial terhadap Sistem Manajemen Akuntansi pengelolaan keuangan desa	1.077	$H_a$ diterima

Penyusunan Anggaran berpengaruh signifikan secara parsial terhadap Sistem Manajemen Akuntansi pengelolaan keuangan desa	-0.668	H <sub>a</sub> ditolak
---	--------	------------------------

**Sumber: data diolah manual, 2017**

Secara parsial hanya variabel Partisipasi Penyusunan Anggaran yang berpengaruh signifikan terhadap Sistem Manajemen Akuntansi Pengelolaan Keuangan Desa sebesar 1.077, sedangkan Variabel Sumber Daya Manusia dan Penyusunan Anggaran tidak berpengaruh signifikan terhadap Sistem Manajemen Akuntansi Pengelolaan Keuangan Desa yaitu masing-masing sebesar -0.856 dan -0.668. Hal ini menunjukkan bahwa semakin baik Partisipasi Penyusunan Anggaran dalam mengelola keuangan desa pada pemerintahan desa Kabupaten Timor Tengah Selatan maka Sistem Manajemen Akuntansi Pengelolaan Keuangan Desa dianggap baik.

Berdasarkan hasil uji hipotesis secara parsial (uji t) seperti yang dikemukakan diatas menunjukkan bahwa Variabel Sumber Daya Manusia dan Penyusunan Anggaran pada uji statistik (uji t) tidak berpengaruh terhadap Sistem Manajemen Akuntansi Pengelolaan Keuangan Desa, ternyata pada telaah kualitatif tidak terbukti. Penyusunan Anggaran juga berpengaruh terhadap Sistem Manajemen Akuntansi Pengelolaan Keuangan Desa. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa aparatur Pemerintahan Desa di Kabupaten Timor Tengah Selatan masih menggunakan Penyusunan Anggaran yang ada pada pemerintah di daerah, sehingga keterlibatan serta keikutsertaan seluruh pemerintahan desa dalam Sistem Manajemen Akuntansi Pengelolaan Keuangan Desa sangat signifikan. Hal ini berbeda dengan Variabel Sumber Daya Manusia, Variabel Sumber Daya Manusia masih dikatakan tidak signifikan terhadap Sistem Manajemen Akuntansi Pengelolaan Keuangan Desa. Hal tersebut dikarenakan masih banyaknya aparatur pemerintahan desa yang belum memahami Sistem Manajemen Akuntansi Pengelolaan Keuangan Desa dengan baik dan benar. Sebagian besar aparatur Pemerintahan Desa hanya menempuh jenjang pendidikan sampai SMA/SMU, sehingga Sistem Manajemen Akuntansi Pengelolaan Keuangan Desa yang dikelola tidak benar-benar transparan dan *akuntabel*. Sistem yang digunakan dalam pengelolaan keuangan desa juga telah diatur dalam Peraturan Daerah, sehingga pemerintahan desa secara *autodidak* mudah menggunakan serta mengaudit dana desa sehingga dapat digunakan sebagai laporan pertanggungjawaban kepada Bupati melalui BPMPD Kabupaten Timor Tengah Selatan.

Berdasarkan pengukuran data diatas, berikut peneliti sajikan tabel rekapitulasi untuk Sumber Daya Manusia, Partisipasi Penyusunan Anggaran, Penyusunan Anggaran, dan Sistem Manajemen Akuntansi.

**Tabel 8**  
**Tabel Rekapitulasi Variabel Sumber Daya Manusia**

No	Pernyataan	Jawaban					Total	Rata-rata
		STS	TS	N	S	SS		
1.	Saya memiliki kemampuan akademik yang sesuai antara pendidikan dengan pekerjaan.	0	0	5	8	3	16	S
2.	Menurut saya, diperlukan kesesuaian antara keahlian dengan pekerjaan yang dimiliki sekarang ini.	1	0	0	8	7	16	S
3.	Dalam pembagian tugas diperlukan penataan uraian jabatan yang telah ada sesuai dengan keahlian masing-masing.	0	0	1	11	4	16	S
4.	Saya bersedia untuk melibatkan diri sepenuhnya dalam tugas-tugas jabatan dengan menerima risiko atas pelaksanaan tugas jabatan tersebut.	0	0	1	12	2	15	S
5.	Saya mempunyai keahlian dalam	2	1	6	6	1	16	S

	melaksanakan tugas yang menggunakan teknologi.							
6.	Saya memiliki teknis untuk meningkatkan kemampuan dalam menyelesaikan masalah.	0	4	2	6	3	15	S

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa semua responden menjawab pernyataan tentang Variabel Sumber Daya Manusia adalah setuju, artinya semua aparatur pemerintahan desa mempunyai Sumber Daya Manusia yang tinggi. Dengan demikian, banyak aparatur pemerintahan desa yang memiliki Sumber Daya Manusia yang tinggi, akan tetapi kurang adanya pembinaan maupun pelatihan-pelatihan yang di adakan oleh Pemerintah Daerah di Kabupaten Timor Tengah Selatan.

**Tabel 9**  
**Tabel Rekapitulasi Variabel Partisipasi Penyusunan Anggaran**

No	Pernyataan	Jawaban					Total	Rata-rata
		STS	TS	N	S	SS		
1.	Dalam menyusun anggaran, program, dan kegiatan, semua pihak ikut dilibatkan.	0	0	0	2	14	16	SS
2.	Saya diberikan banyak kesempatan untuk ikut dalam penyusunan anggaran.	0	0	1	9	6	16	S
3.	Saya memberikan banyak informasi dalam pelaksanaan anggaran.	0	0	1	9	6	16	S
4.	Kontribusi semua pihak terhadap partisipasi anggaran sangat besar.	0	1	2	8	5	16	S
5.	Saya memiliki pengaruh yang kuat terhadap proses penyusunan rencana anggaran.	0	2	6	4	2	14	N
6.	Pendapat saya jarang diterima ketika menetapkan perencanaan anggaran di satuan unit kerja.	2	6	6	2	0	16	N

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa kebanyakan responden menjawab pernyataan tentang Variabel Partisipasi Penyusunan Anggaran adalah setuju, artinya semua aparatur pemerintahan desa mempunyai Partisipasi yang tinggi dalam Penyusunan Anggaran tentang Alokasi Dana Desa. Artinya aparatur pemerintahan yang ada di desa memiliki partisipasi atau keikutsertaan dalam menyusun anggaran Keuangan Desa, sehingga perlu adanya perhatian dari Pemerintah Daerah untuk terus melakukan pembenahan-pembenahan yang berhubungan dengan Pengelolaan Keuangan Desa yang dimiliki oleh setiap aparatur pemerintahan yang ada di desa Kabupaten Timor Tengah Selatan.

**Tabel 10**  
**Tabel Rekapitulasi Variabel Penyusunan Anggaran**

No	Pernyataan	Jawaban					Total	Rata-rata
		STS	TS	N	S	SS		
1.	Saya mengerti cara penyusunan anggaran secara jelas dan komprehensif.	0	0	5	10	1	16	S
2.	Saya menyadari bahwa penyusunan anggaran merupakan hal yang penting dan perlu diprioritaskan.	0	0	0	3	13	16	SS
3.	Penyusunan anggaran secara umum cukup jelas dan tidak membingungkan.	0	0	5	9	2	16	S
4.	Saya memahami sepenuhnya cara penyusunan anggaran.	0	0	8	6	2	16	N
5.	Penyusunan anggaran disesuaikan dengan Rencana Anggaran dan Belanja Daerah.	0	0	0	7	9	16	SS

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa kebanyakan responden menjawab pernyataan tentang Variabel Penyusunan Anggaran adalah setuju dan sangat setuju, artinya semua aparatur pemerintahan desa memahami Sistem Penyusunan Anggaran yang ada. Dengan

demikian, Pengelolaan Keuangan Desa dapat dipertanggungjawabkan kepada Pemerintah Daerah dengan transparan serta *akuntabel*.

**Tabel 11**  
**Tabel Rekapitulasi Variabel Sistem Manajemen Akuntansi**  
**Pengelolaan Keuangan desa**

No	Pernyataan	Jawaban					Total	Rata-rata
		STS	TS	N	S	SS		
1.	Sistem Manajemen Akuntansi Pengelolaan Keuangan Desa yang diterapkan sesuai dengan prosedur.	0	0	0	11	5	16	S
2.	Manajemen Akuntansi yang digunakan selama ini efektif dan efisien.	0	0	4	9	3	16	S
3.	Manajemen Akuntansi yang dilakukan telah relevan dengan fakta atau keadaan keuangan yang ada.	0	0	0	12	4	16	S
4.	Manajemen Akuntansi yang diterapkan menimbulkan dampak yang baik bagi instansi.	0	0	0	11	5	16	S
5.	Dalam pencatatan akuntansi dilakukan identifikasi/pengklasifikasian.	0	0	1	11	4	16	S
6.	Penjurnalan dan posting yang dilakukan sesuai dengan yang ditetapkan pemerintah.	0	0	1	11	4	16	S
7.	Sering terjadi kesalahan atau penyimpangan dalam pelaporan keuangan.	0	4	8	4	0	16	N

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa lebih banyak responden menjawab pernyataan tentang Variabel Sistem Manajemen Akuntansi Pengelolaan Keuangan Desa adalah setuju, artinya semua aparatur pemerintahan desa menyetujui Sistem Manajemen Akuntansi Pengelolaan Keuangan Desa yang ada di Pemerintahan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan. Dengan demikian, aparatur Pemerintahan Desa mengerti serta memahami Sistem Manajemen Akuntansi dalam Pengelolaan Keuangan Desa.

## SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat diambil simpulan bahwa Sumber Daya Manusia berpengaruh signifikan terhadap Sistem Manajemen Akuntansi pengelolaan keuangan desa sebesar 1.077, sedangkan Partisipasi Penyusunan Anggaran dan Penyusunan Anggaran tidak berpengaruh signifikan terhadap Sistem Manajemen Akuntansi pengelolaan keuangan desa yaitu masing-masing sebesar -0.856 dan -0.668. Artinya Pemerintah Daerah Timor Tengah Selatan perlu meningkatkan mutu Sumber Daya Manusia yang ada pada aparatur pemerintahan di desa Kabupaten Timor Tengah Selatan, agar mereka dapat mengerti maupun memahami tentang penerapan Sistem Manajemen Akuntansi dalam Pengelolaan Keuangan Desa sehingga pertanggungjawaban yang dibuat benar-benar dapat dipertanggungjawabkan dengan baik dan benar. Mengenai Partisipasi Penyusunan Anggaran dan Penyusunan Anggaran itu sendiri telah di pahami dengan baik, karena aparatur pemerintahan desa yang ada di Kabupaten Timor Tengah Selatan masih menganut sistem kekeluargaan sehingga sifat gotong-royong masih diterapkan sampai sekarang. Sedangkan mengenai Penyusunan Anggaran, Sistem Penyusunan Anggaran yang ada pada Pemerintah Daerah di Kabupaten Timor Tengah, juga diterapkan pada seluruh desa yang ada di Kabupaten Timor Tengah Selatan. hal tersebut yang membuat Partisipasi Penyusunan Anggaran dan Penyusunan Anggaran tidak berpengaruh signifikan terhadap Sistem Manajemen Akuntansi Pengelolaan Keuangan Desa yang ada di Kabupaten Timor

Tengah Selatan.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Arsyati, 2008, "*Strategi Memimpin Dalam Pusaran Praktik Korupsi: Mengatasi Masalah Dengan Cara Menyempurnakan Masalah Dari Hulu Sampai Ke Hilir*", 2011.
- Bastian, 2006, "**PENGARUH KEPEMIMPINAN, PELATIHAN, DAN KOMPETENSI APARATUR TERHADAP IMPLEMENTASI ANGGARAN BERBASIS KINERJA SKPD DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT**", 2014.
- Carmen, 2012, "**Pemahaman Sistem Akuntansi Keuangan Daerah**", Forum Diskusi DPPKAD Kab. Banjarnegara, 2016.
- Fathoni, 2006, "**Pengertian dan Peranan Sumber Daya Manusia**", 2013.
- Giri, 2014, "**Pengaruh Partisipasi Penganggaran Pada Kinerja Manajerial Dengan Keadilan Distributif, Keadilan Prosedural, Dan Komitmen Tujuan Anggaran Sebagai Variabel Pemediasi**", Tesis Program Pasca Sarjana Universitas Udayana, Bali.
- Hansen, 2009, "**Peran, Sejarah, dan Tujuan Akuntansi Manajemen**", 2012.
- Haruman, 2009, "**Penganggaran Perusahaan**", 2015, Surabaya.
- Himawan, 2010, "**Pengaruh Komitmen Organisasi, Gaya Kepemimpinan Dan Job Relevant Information (JRI) Terhadap Hubungan Antara Partisipasi Anggaran Dan Kinerja Manajerial (STUDI Empiris Pada BPR di Kota Semarang)**", Artikel Fakultas Ekonomi Universitas Semarang, Semarang.  
<http://library.binus.ac.id/eColls/eThesisdoc/Bab2/2011-2-00112-MN%20Bab2001.pdf>  
<http://qmc.binus.ac.id/2014/11/01/u-j-i-v-a-l-i-d-i-t-a-s-d-a-n-u-j-i-r-e-l-i-a-b-i-l-i-t-a-s/>  
<http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/631/1/92665-PENGARUH%20KARAKTERISTIK%20GAYA%20PENYUSUNAN%20ANGGARAN%20TERHADAP%20KINERJA%20MANAJERIAL.pdf>  
<http://www.academia.edu/5335122/KEPEMIMPINAN KOMUNIKASI DAN MOTIVASI DA LAM ORGANISASI Oleh FX. SUPRIYONO>
- Irvan Nur Iva, 2013, "**Proses Penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD)**", Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Jurusan Ilmu Administrasi Universitas Hasanuddin, Makassar.
- Iskandar, 2008, "**Kajian Teori, Kerangka Konseptual dan Hipotesis**", 2010.
- Keni, 2008, "**Penyusunan Anggaran Dalam Matkul Sistem Pengendalian Manajemen**", 2011.
- Nordiawan, 2006, "**Pengaruh Partisipasi Penyusunan Anggaran Terhadap Kinerja Manajerial Dengan Variabel Intervening Motivasi Dan Kepuasan Kerja Pada SETDAKAB Aceh Utara**", Aceh.
- Parron, 2008, "**Jurnal Manajemen Bisnis**", Volume 1, 2008.
- Pasal 1 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang **Pengertian Keuangan Negara**.
- Peraturan Bupati Timor Tengah Selatan Nomor 27 Tahun 2015 Tentang **Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa**.
- Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 Tentang **Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah, dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan Dan Belanja**.
- Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 Tentang **Pengelolaan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah**.
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang **Pengelolaan Keuangan Daerah**.
- Permendagri Nomor 39 Tahun 2015 Tentang **Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan**.

- Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang **Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.**
- Permendagri Nomor 26 Tahun 2006 Tentang **Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2007.**
- Prawironegoro, 2008, "**Pengertian Akuntansi**", *Irodikromo*, 2013.
- Purwanto, 2007, "**Pengertian Hipotesis Menurut Para Ahli**", 2015.
- Robbins, 2008, "**Makalah Motivasi Belajar**", 2014.
- Saraswati, 2015, "**PENGARUH PARTISIPASI PENYUSUNAN ANGGARAN TERHADAP KINERJA MANAJERIAL DENGAN JOB RELEVANT INFORMATION SEBAGAI VARIABEL MODERATING (Studi pada Dinas Pemerintah Kota Yogyakarta)**", Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Yogyakarta, Yogyakarta.
- Sari, 2013, "**Sistem Informasi Manajemen dan Perannya Dalam Operasional Perusahaan**", *Sistem Informasi Manajemen*.
- Sofyandi, 2009, "**Aneka Pengertian Manajemen**", 2015.
- Solihin, 2014, "**Hubungan Berbagai Variabel Dalam Penelitian**", *VISI UNIVERSAL PENDIDIKAN*, 2015.
- Sugiyanto, 2005, "**Pengaruh Partisipasi Anggaran Terhadap Kinerja Manajerial: Komitmen Tujuan Sebagai Variabel Intervening (Studi Empiris Pada Rumah Sakit Tipe A, B, Dan C, Di Jawa Tengah Dan Daerah Istimewa Yogyakarta)**", Yogyakarta.
- Tilaar, 2009, "**Perencanaan Pembangunan Menggunakan Konsep Bottom Up dan Top Down**", *Kumpulan Makalah Ekonomi*, 2014.
- Thorndike, 2011, "**Teknik Pengumpulan Data**", *Teknologi Pendidikan*.
- Undang-undang Desa Pasal 72 Tentang **Keuangan Desa.**
- Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang **Desa.**
- Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang **Pemerintahan Daerah.**
- Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang **Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.**
- Widjaya, 2009, *Jurnal Riset Akuntansi Going Concert*, Volume 9 Tahun 2014.
- Widyaningsih, 2011, "**Faktor-faktor Pemilihan Profesi Akuntan**", 2013